

Perbedaan Tak Harus Membuat Kita Bertikai

Salahuddin Wahid

Terjadi peristiwa menarik pada 16 Juli 2008. Sebuah konferensi antar agama diselenggarakan di Madrid dengan sponsor Raja Abdullah dari Saudi Arabia. Tujuannya ialah menyatukan Muslim, Kristen dan Yahudi agar lebih dekat, setidaknya dalam sebuah forum.

Raja Abdullah mengatakan, “Para saudaraku, kita harus mengatakan kepada dunia bahwa perbedaan tak harus membuat kita bertikai”. Raja meminta semua umat dari berbagai agama didunia agar menjauhi ekstremisme dan mendorong rekonsiliasi. Raja Spanyol mengatakan bahwa “Kami selalu tertarik memperkuat perdamaian internasional” (*Kompas* 17 Juli 2008).

Raja Abdullah sudah mencoba merangkul kaum non Muslim sejak dia menjadi raja pada 2005. Pada 2007 terjadi perte-

muan pertama antara seorang Paus dengan Raja Arab Saudi. Juni 2007 di Mekkah diselenggarakan dialog khusus Muslim terutama antara kelompok Sunni dan Syiah. Dalam pertemuan itu hadir imam besar al Azhar Mohamed Sayed Tanthawi dan mantan Presiden Iran Akbar Hashemi Rafsanjani.

Selama ini masyarakat dan pemerintah Arab Saudi yang mayoritas berahlan Wahabi dianggap relatif kurang toleran terhadap agama lain dan muslim kelompok lain seperti Syiah dan madzhab lain dari Sunni. Dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi, Paus Benedictus meminta Saudi mengizinkan berdirinya gereja di sana. Konon ada se kitar satu juta umat Kristiani di sana, yang merupakan pegawai asing dan keluarganya. Tetapi tampaknya permintaan itu sulit untuk dipenuhi (Majalah Tempo 27 Juli 2008).

Muslim di Eropa

Pada Januari 2007 diadakan jajak pendapat oleh lembaga Populus untuk *think tank Policy Exchange* Inggris dengan 1000 responden muslim di Inggris. Kelompok A berusia 16-24 tahun dan kelompok B berusia

diatas 55 tahun. 62% dari kelompok A merasa memiliki kesamaan dengan non-Muslim di Inggris dari pada muslim di luar Inggris, dan pada kelompok B angkanya mencapai 71%. 37% dari kelompok A dibanding 19% dari kelompok B, lebih suka mengirim anak-anak mereka ke sekolah Islam. 37% dari kelompok A dibanding 17 % dari kelompok B, lebih suka hidup menurut hukum Syariah dari pada hukum Inggris. 74% dari kelompok B dibanding 28% dari kelompok B, lebih suka perempuan muslim memakai jilbab. 13 % dari kelompok A dibanding 3% dari kelompok B, mengagumi organisasi seperti Al Qaidah.

Tidak mudah menerjemahkan atau menafsirkan data diatas. Talajeh Livani, konsultan bagi Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara Bank Dunia, dalam Koran Tempo 23 Juni 2007, menyatakan bahwa para pemuda Muslim itu tertarik ke akar mereka karena perasaan dan keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah diterima sebagai penduduk asli di negara-negara Eropa tempat mereka dibesarkan. Di AS, seorang Amerika dapat berkulit putih, hitam, keturunan Asia, Latin, Timur Tengah dsb. Namun di Eropa, ada sebuah gam-

baran tentang seperti apa rupa penduduk asli suatu negara.

Generasi lebih tua meninggalkan negara mereka karena alasan sosial, ekonomi dan politik, yang merupakan masalah keberlangsungan hidup. Generasi muda memandang diri mereka berdiri sama tinggi dengan penduduk asli dari negara baru mereka. Mereka ini adalah kaum muda yang belajar di sekolah-sekolah Eropa, tumbuh besar dengan teman-teman Eropa dan memiliki kenangan masa kanak-kanak akan jalan, mal dan bioskop yang sama. Mereka merasa kecewa ketika masyarakat tidak memperlakukan mereka setara dengan teman-teman Inggris, Perancis atau Jerman mereka. Diskriminasi ini muncul muncul di segala ruang kehidupan, dari kesempatan kerja hingga masuk ke sebuah klub dansa.

Ketika Al Qaida menyerang WTC di New York, bangsa-bangsa Eropa menyadari bahwa amat penting untuk melibatkan masyarakat muslim di negara mereka, yang jumlahnya kian banyak. Itu dapat mengirimkan pesan kepada arus utama masyarakat bahwa muslim sama sekali bukan ancaman bagi peradaban Barat. Bahkan seorang tokoh di Inggris me-

nyatakan bahwa syariat Islam dapat menjadi bagian dari hukum Inggris, yang lalu mendapat kecaman berbagai pihak.

H.A. Hellyer, peneliti pada University of Warwick dan anggota Pusat Kajian Islam Oxford membuat pemetaan masyarakat muslim di beberapa negara Eropa. Ternyata masyarakat Islam di berbagai negara Eropa tidak sama dengan masyarakat gereja kristen yang mempunyai badan tunggal yang mewakili mereka. Tidak adanya wadah tunggal itu membuat kebijakan pemerintah yang ingin mengupayakan keterlibatan muslim, menghadapi masalah yang berat.

Dengan adanya kondisi seperti itu, muncul pertanyaan siapakah yang mewakili muslim Eropa dalam Konferensi Antar Agama di Madrid itu? Pertanyaan yang sama juga diajukan, apakah umat Islam di Amerika dan Asia Tengah dan Asia Tenggara juga diundang? Siapakah yang mewakili mereka?

Kondisi Mutakhir di Indonesia

Tentu terlalu pagi untuk segera mengharapkan adanya pengaruh dari kon-

perensi tersebut terhadap Indonesia dan tempat lainnya. Pengaruh itu akan terlihat dalam waktu yang cukup lama dengan syarat harus dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi konferensi itu.

Kita sudah menyelenggarakan banyak sekali dialog antar agama di LN dan DN, tetapi dampaknya kedalam kehidupan antar agama di Indonesia tidak terlalu besar. Di LN yang terakhir sebelum konperensi di Madrid adalah ASEM *Interfaith Dialogue* ke empat di Amsterdam (3-5 Juni 2008). Di DN yang terakhir ialah *International Conference of Islamic Scholar* ke tiga yang membahas resolusi konflik. Kita melihat bahwa berbagai tindak kekerasan terhadap agama lain atau sesama muslim masih tetap terjadi.

Kita masih menyaksikan adanya pelanggaran pendirian gereja di berbagai tempat seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dari para aktifis gereja diperoleh informasi bahwa selama 2008 terdapat sekitar 34 gereja, 24 gereja Batak (HKBP) dan 10 gereja Pantekosta, yang tidak bisa memperoleh izin sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah. Menurut informasi itu, walau-

pun persyaratan yang ditentukan Perber Dua Menteri itu sudah dipenuhi, Lurah tidak mau memberi keterangan.

Tentu saja informasi itu perlu diklarifikasi dan dicoba untuk menyelesaikannya supaya kehidupan beragama khususnya pendirian rumah ibadah dapat dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Yang penting, kita tidak ingin ada tindak kekerasan seperti penghancuran atau penutupan paksa terhadap gereja. Seandainya ada gereja yang sudah terlanjur berdiri tanpa ijin, bisa diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan ijinnya atau memindahkannya ketempat baru yang punya ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak kekerasan terhadap mahasiswa SETIA-Sekolah Tinggi Teologia..... dan perusakan terhadap kampusnya (minggu ketiga Juli 2008) perlu kita sesali. Perlu diklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, apakah kasus itu betul-betul tidak ada kaitannya dengan isu agama. Dan kalau itu kasus biasa, jangan sampai dipaksakan menjadi kasus SARA.

Kalau memang ada isu agama pun, jangan ditutupi karena kita akan

menyimpan bom waktu yang siap meledak lagi di masa depan. Kalau kampus itu sudah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin, tentu harus diberi perlindungan sesuai hak mereka yang dijamin oleh UU dan UUD. Salah satu masalah yang amat merisaukan kita ialah tindak kekerasan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah dan hak milik mereka seperti yang terjadi di sejumlah tempat sejak tahun 2003. Selama tahun 2008 yang menonjol dari kasus ini ialah adanya tuntutan dari banyak pihak kepada Pemerintah untuk membubarkan atau melarang keberadaan jemaah Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada awal tahun 2008 Pemerintah meminta Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menanggapi pernyataan bahwa warga JAI tidak mengikuti keyakinan yang menyimpang dari akidah dan ketentuan agama Islam. Selanjutnya akan dipantau apakah JAI mengikuti dengan konsekwen pernyataan tersebut selama tiga bulan.

Pihak yang menuntut pembubaran JAI itu lalu melakukan pemantauan secara seksama dan mempublikasi hasil pemantauan tersebut melalui pers

terutama *Harian Republika*. Setelah batas waktu terlampaui, maka mereka menuntut dan menekan Pemerintah untuk segera membubarkan JAI. Sebaliknya para aktifis pembela HAM dan sejumlah tokoh Islam menolak pembubaran JAI karena dianggap bertentangan dengan UUD.

Terdapat dua kelompok yang saling bertentangan pendapat dalam menyikapi keberadaan JAI di Indonesia. Keduanya merasa pendapat mereka benar dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang menjadi masalah, kedua kelompok itu tidak mau berdialog untuk mencari pemecahan tetapi berdemo. Terjadilah bentrok yang menyedihkan dan memalukan antara anggota FPI dan AKKBB di Lapangan Monas pada 1 Juli 2008.

Pihak FPI berdalih bahwa mereka diprovokasi oleh iklan AKKBB beberapa hari sebelumnya, yang berjudul "Selamatkan Indonesia Kita". Mereka bahkan akan menuntut secara hukum sejumlah besar nama yang tercantum sebagai pemasang iklan itu seperti antara lain Amien Rais, Gus Dur, Syafii Maarif. Kalau iklan itu di anggap sebagai provokasi, FPI seharusnya memasang iklan menanggapi-

inya. Sebaliknya saya bertanya di dalam hati, apakah memang perlu memasang iklan untuk menyelesaikan masalah ini?

Jangan suatu masalah (perbedaan penafsiran terhadap UU dan UUD) diselesaikan dengan cara yang menimbulkan masalah baru (tindak kekerasan). Hal itu tidak bisa diselesaikan dengan memasang iklan dan demo, tetapi dengan dialog yang diselenggarakan dengan kepala dingin dan cara yang berbudaya. Tidak boleh ada pemaksaan pendapat dengan membawa massa besar kedalam forum dialog.

Pada saat ini terdapat UU No 1 PNPS/1965 yang memberi landasan bagi Pemerintah untuk mengeluarkan SKB yang sudah dilakukan Pemerintah, bahkan bisa membubarkan JAI. Tetapi para aktifis HAM, menganggap UU itu bertentangan dengan UUD. Cara yang paling tepat ialah mengajukan uji material terhadap UU itu ke MK. Apapun putusan MK harus kita ikuti.

Hambatan Yang Dihadapi

Cukup banyak hambatan yang diha-

dapi dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat berbeda agama dan antar kelompok dalam satu agama, di Indonesia. Beberapa diantaranya akan dikemukakan disini.

Banyak umat dan tokoh Islam yang mencampuradukkan hukum agama dengan hukum negara. Misalnya dalam masalah keberadaan jamaah Ahmadiyah di Indonesia, mereka mengacu kepada hukum Islam dan kesepakatan dunia Islam internasional yang mengatakan bahwa Ahmadiyah harus dilarang.

Mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa masalah Ahmadiyah itu tidak semata-mata masalah agama. MUI dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah itu sesat. Itu adalah masalah agama. MUI berhak membuat pernyataan semacam itu, tetapi perlu dicatat bahwa ada sejumlah cendekiawan Muslim yang tidak sependapat.

Banyak ulama yang tidak memahami bahwa masalah hak hidup dan keberadaan JAI di Indonesia bukanlah masalah agama, tetapi masalah negara. Dan masalah negara tidak mengacu kepada hukum agama, tetapi

hukum negara yaitu UU dan UUD. Diatas sudah diuraikan penyelesaian terbaik masalah AHmadiyah.

Pasca Orde Baru, kebebasan diberikan kepada semua pihak untuk menawarkan gagasan apapun kecuali komunisme, walaupun dalam kenyataannya pelarangan terhadap penyebaran komunisme juga tidak bisa efektif diterapkan. Dengan sendirinya semua gagasan baik dari Timur Tengah maupun Barat juga tidak bisa dibatasi. Muncullah kelompok yang memperjuangkan kembali negara Islam, bahkan yang memperjuangkan khilafah Islamiyah. Mereka harus diberi ruang sesuai dengan kebebasan berserikat yang dijamin UUD.

Pada saat ini kelompok radikal Islam jumlahnya cukup banyak. Yang paling menonjol dan tersebar luas dengan jumlah anggota yang besar ialah Front Pembela Islam (FPI). Mereka sering sekali melakukan razia dan penutupan terhadap tempat maksiat seperti perjudian, minuman keras dan pelacuran (warung remang-remang). Semua aksi kekerasan itu di landasi dengan prinsip *amar maruf nahi munkar*.

Mengapa mereka melakukan tindak

kekerasan itu? Padahal al Qur'an (QS an Nahl ayat 125) dan hadits Rasulullah SAW menganjurkan agar dakwah dilakukan dengan santun dan persuasif? Habib Rizieq punya argumentasi berdasar kaidah hukum : *Maa laa yatimmu al wajibu illa bihi, fahuwa al wajib* (apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban, kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib). Menurutny, bahwa tanpa kekerasan tidak mungkin memberantas maksiat, maka kekerasan juga menjadi suatu kewajiban.

Habib Rizieq, tokoh utama FPI, adalah tamatan Saudi Arabia. Dalam masalah *fiqh*, dia adalah pengikut *ahlussunnah wal jama'ah* khususnya madzhab Syafii, tetapi dalam masalah akidah, dia penganut Wahabi/Karena itu terlihat bahwa tindakannya tanpa kompromi.

Konferensi di Madrid itu juga ingin mempertemukan Islam dengan Yahudi. Yang menjadi masalah ialah adanya generalisasi terhadap sesuatu yang terkait Yahudi. Publik kita memang belum bisa membedakan antara agama Yahudi, penganutnya dan pemerintah Israel atau pendukung Zionisme. Kita belum bisa seperti Bahrain, negeri Muslim di Timur Tengah, yang

mengangkat seorang wanita berdarah Yahudi menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat.

Perlu dicatat dan diketahui oleh publik bahwa ada sebuah kelompok Yahudi Neturei Karta Internasional atau pribadi-pribadi yang sejak lama berpandangan bahwa apa yang dilakukan Zionisme atau Pemerintah Israel terhadap Palestina tidak berkaitan dengan Yudaisme atau agama Yahudi. Kelompok di atas berani menolak Zionisme.

Rabbi E. Schwarts dari kelompok di atas menulis: "Para politisi Zions dan kroni mereka tidak berbicara demi kepentingan masyarakat Yahudi. Mereka telah membajak dan menodai nama Israel. Menurut Taurat, umat Yahudi tidak diizinkan menumpahkan darah, menghina atau menjajah bangsa lain. Albert Einstein pernah menulis bahwa dia lebih setuju prinsip saling menghormati dengan bangsa Arab. Noam Chomsky juga menentang Zionisme. Sekitar 25% warga Yahudi di seluruh dunia menentang Zionisme.

Tetapi kita paham bahwa sungguh tidak mudah untuk memberi pemahaman seperti itu kepada umat Is-

lam di manapun yang telah lama mempunyai pandangan yang *nggebyah uyah* seluruh umat Yahudi. Diperlukan waktu lama, secara persuasif dengan bukti-bukti kuat. Kalau dengan cara seperti yang dilakukan Gus Dur, reaksinya justru negatif.

Catatan Akhir

Dari uraian singkat diatas, sebenarnya tidak ada yang baru dari dialog antar-agama di Madrid. Yang menarik ialah bahwa sponsor utamanya adalah Raja Saudi Arabia. Yang diharapkan ialah bahwa perubahan sikap Raja Saudi Arabia itu bisa diikuti dengan perubahan sikap para ulama Wahabi di sana yang selanjutnya diharapkan akan diikuti oleh perubahan sikap para alumni perguruan Arab Saudi yang tersebar di banyak tempat termasuk Indonesia.

Perubahan sikap para ulama Wahabi itu tentu tidak mudah dan tidak bisa serta merta, membutuhkan waktu amat lama, karena selama ini doktrin mereka yang menekankan puritanisme memang membuat mereka selalu merasa benar sendiri di antara berbagai kelompok Islam dan mudah mengkafirkan kelompok lain.

Kalau ulama Wahabi di Arab Saudi sudah berubah menjadi moderat, maka di masa depan diharapkan upaya meredam radikalisme dan fundamentalisme akan memberikan hasil yang baik.

Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa radikalisme terhadap Barat sebenarnya tidak bertitik berat pada masalah agama, tetapi pada masalah ketidakadilan global. Artinya selama ketidakadilan global tetap bertahan dan juga para anak muda Islam di Eropa dan mungkin juga di Amerika Serikat tidak diterima dengan tangan terbuka dan menerima perlakuan diskriminatif, maka sulit untuk berharap terlalu banyak terhadap dialog antar agama.

Kita di sini sering mendengar atau membaca ungkapan bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan atau keragaman dalam budaya, agama, bahasa, suku

dan etnik memang indah dan bisa membuat Indonesia seperti mozaik yang memukau. Tetapi perbedaan kaya dan miskin, apa lagi yang amat mencolok seperti yang kita saksikan sekarang di banyak tempat di negeri kita, sungguh amat menyedihkan dan merupakan tragedi bangsa kita yang memalukan sekaligus memilukan.

Perbedaan kaya dan miskin adalah perbedaan antara bumi dan langit, perbedaan antara terang dan gelap, perbedaan antara pandai dan bodoh. Rakyat miskin kehilangan hak-hak dasarnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan perbedaan seperti itu akan menjadi lahan subur bagi pertentangan sosial, apalagi kalau dibarengi dengan perbedaan agama dan perbedaan etnik. Perbedaan tiga lapis ini akan mudah menjadi rumput kering yang tersedia bagi para penghasut, siapa-pun juga mereka itu, termasuk yang menggunakan isu agama. □